

ANALISIS KINERJA INTERNAL, *BALANCE SCORECARD* DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN MIKRO BERKELANJUTAN (STUDI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI PROVINSI BALI)

I Wayan Suartana

Dodik Ariyanto

Jurusan Akuntansi FE Universitas Udayana

ABSTRACT

Starting in 1984 Bali's village micro financial institutions, which are called Lembaga Perkreditan Desa (LPD), were set up at the level of the customary village. These villages own, finance and govern the LPDs as an integral part of Balinese culture. The final say in every matter lies with the assembly of indigenous residents ("krama"), the ultimate authority in every village. This research is aimed to analyze the relationship between LPD and contribution of LPD in order to reduce % percentage of population below the poverty line (%PBL). The independent variable Return on Asset (ROA) has contribution to reduce PBL. ROA is internal performance of LPD. Additonal analysis is conducted by field experiment to explore improvement internal performance of LPD with Balance Scorecard. Balance Scorecard is not only measurement tools but strategic tools in order to reduce %PBL.

Keywords: LPD, internal performance, balance scorecard and poverty

PENDAHULUAN

Implementasi relevansi nilai (*value relevance*) laporan keuangan menjadi perdebatan yang hangat. Ini disadari oleh semua pemangku kepentingan akuntansi, karena mereka menginginkan akuntansi masa depan adalah akuntansi yang mempunyai nilai tambah. Konsekuensi logisnya, berubahlah paradigma dalam memandang perusahaan dari pendekatan keagenan ke pendekatan pemangku kepentingan. Pendekatan pemangku kepentingan memuat esensi apakah laporan keuangan (dalam hal ini analisis rasio kinerja keuangan) memiliki kekuatan untuk memprediksi kondisi sosial dan keberlanjutan masyarakat sekitarnya, misalnya penanggulangan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, akuntansi diharapkan memiliki peran dalam usaha yang berkelanjutan yang berujung pada kebermaknaan bagi masyarakat sekitarnya.

Penelitian ini mengkaji hubungan antara rasio kinerja internal terpilih dengan penanggulangan kemiskinan lewat pendekatan lembaga keuangan mikro Lembaga Perkreditan Desa (LPD) suatu lembaga keuangan mikro berbasis adat yang menjadi ciri khas dan kearifan lokal masyarakat Bali. Penelitian tidak hanya mengkaji relasi antara besaran-besaran akuntansi yang tercermin dari rasio-rasio kinerja keuangan internal terpilih, tetapi juga mengimplementasikan pendekatan *balance socrecard* (BSC) pada salah satu entitas LPD sebagai alat pengukuran maupun alat strategi dalam meningkatkan peranan dan kontribusi LPD. Kajian kedua ini menggunakan eksperimen lapangan. Kajian kedua merupakan pelengkap dari kejadian pertama dengan tetap memfokuskan (*subject matter*) yaitu peranan dan peningkatan kinerja internal LPD dalam penanggulangan kemiskinan.

Berikut disajikan perkembangan LPD selama lima tahun terakhir.

Tabel 1 Perkembangan LPD 1995-2009

Indikator	1995	2001	2005	7/2009
Jumlah LPD	848	953	1.304	1.368
Aset total (milyar Rp.)	97	696	1.743	3.766
Portofolio pinjaman total (milyar Rp.)	75	512	1.262	2.764
Simpanan total (milyar Rp.)	70	540	1.346	3.044
Jumlah Karyawan	Data tidak tersedia	4.872	6.479	7.043

Sumber: PT BPD Bali (Juli 2009)

Dari tabel 1 dapat dijelaskan bahwa dalam kurun waktu lima tahun, semua indikator pertumbuhan mencapai di atas 500 % kecuali dari tahun 1995 sampai 2001. Perkembangan fantastis terjadi antara kurun waktu tahun 2001-2005, padahal pada periode tersebut masih terjadi krisis moneter dan ekonomi. Ini membuktikan bahwa LPD sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai daya tahan dan stamina untuk bertahan hidup sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bali. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, aset dan simpanan total LPD tumbuh lebih dari beberapa kali lipat dan jumlah rekening simpanan bertambah signifikan. Sejak tahun 2000an, kas dan penempatan antarbank LPD telah tumbuh dari 20% menjadi 27% dari aset totalnya. Portofolio pinjaman dan indikator kesehatan menunjukkan pertumbuhan yang pesat.

Untuk pengambilan keputusan ekonomi, para pelaku bisnis membutuhkan informasi tentang kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk memahami informasi laporan keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan alternatif untuk menguji apakah informasi keuangan bermanfaat untuk melakukan klasifikasi atau prediksi terhadap kinerja internal perusahaan. Analisis rasio keuangan didasarkan pada data keuangan historis yang tujuan utamanya memberikan suatu indikasi kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Dalam konteks ini analisis terhadap kinerja internal LPD

melalui laporan keuangan menjadi relevan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Adanya hubungan antara kontribusi kinerja internal LPD dengan persentase penurunan angka kemiskinan didasarkan atas beberapa hasil penelitian sebelumnya. Menurut Komite Pemberantasan Kemiskinan (Sutopo,2005) untuk mencapai sasaran penurunan angka kemiskinan diperlukan strategi pemberdayaan masyarakat melalui dua cara, yaitu pertama, mengurangi kemiskinan dan kedua, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya. Sumodiningrat (2003) menyatakan bahwa peningkatan produktivitas dilakukan melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat, terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi penajaman program, pendanaan dan pendampingan. Usaha mikro merupakan mayoritas dari total usaha yang ada di Indonesia sebab berjumlah 98% dari total unit usah atau 39 juta usaha.

Sumodiningrat (2003) mengemukakan bahwa pemberdayaan LKM merupakan salah satu prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam rangka pengembangan usaha kecil yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini didasarkan atas LKM itu sendiri memuat tiga elemen kunci (versi dari Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia). Pertama, menyediakan beragam jenis pelayanan

keuangan yang relevan dengan kebutuhan riil masyarakat yang dilayani. Kedua, melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (masyarakat miskin menjadi pihak beneficiaries utama). Ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan.

Usaha kecil sebagai basis ekonomi kerakyatan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional suatu bangsa. Di Indonesia, usaha kecil mampu menyerap 88% tenaga kerja, memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 40%, dan mempunyai potensi sebagai salah satu sumber penting pertumbuhan ekspor, khususnya ekspor non-migas (*Indonesia Small Business Research Center*, 2003 dalam Pinasti 2007).

Kinerja internal LPD merupakan angka-angka akuntansi yang mencerminkan sehat tidaknya suatu LPD. Banyak indikator yang bisa mewakili kinerja internal LPD diantaranya adalah BOPO yaitu perbandingan biaya operasional LPD dengan pendapatan operasional, return on asset yaitu perbandingan antara laba yang terealisasi dengan aset yang digunakan, rentabilitas yaitu kemampuan LPD dalam menghasilkan laba. Di samping itu aksesibilitas dan rasio kredit menjadi sesuatu yang penting dalam kinerja internal LPD.

Kemudahan akses (*accessibility*) menggunakan variabel rasio unit LKM yang tersedia terhadap 1.000 penduduk yang menempati provinsi tertentu. Variabel ini diharapkan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kinerja usaha mikro sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan karena dengan asumsi semakin banyak unit LKM akan memudahkan untuk mengakses keuangan mikro tersebut. Penetapan rasio kredit sebagai variabel antaseden karena pangsa kredit diharapkan mempunyai pengaruh terhadap masalah usaha mikro saat ini. Hal ini didasarkan atas hasil survey bahwa sebanyak 40,34% pengusaha kecil mengalami kesulitan modal dalam menjalankan usahanya (BPS Statistik IK dan IRT, 1998 dalam Sutopo, 2005). Usaha kecil di Indonesia mengalami dua masalah utama dalam aspek finansial, yaitu pertama, mobilisasi modal awal (*start up capital*)

dan akses ke modal kerja, dan kedua, finansial jangka panjang untuk investasi. Keuangan mikro berfungsi memberikandukungan modal bagi pengusaha mikro untuk meningkatkan usahanya, dimana dapat berbentuk: 1) *banking of the poor*, 2) *banking with with the poor*, dan 3) *banking for the poor*. Variabel ini diukur dari rasio jumlah kredit yang dikucurkan terhadap 1.000 penduduk yang menempati propinsi tertentu karena untuk melihat hubungannya terhadap angka kemiskinan di Kabupaten tertentu.

Menurut Sutopo (2005) langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan akses UK kepada LKM adalah: (1) membangun 'Kapasitas Keuangan Mikro'; (2) melakukan 'Perluasan Jaringan Kerja' seperti yang dilakukan BRI Unit; dan (3) memberikan perhatian penuh terhadap faktor-faktor yang menghambat pengembangan UK. Rasio tabungan berpengaruh negatif terhadap %PBPL secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh: 1) LKM harus menjalankan fungsinya sebagai '*Banking for The Poor*' dimana sumber dari financial support terutama bukan diperoleh dari mobilisasi tabungan masyarakat miskin, namun harus diperoleh dari sumber lain yang memang ditujukan untuk masyarakat miskin. (2) keberadaan LKM diharapkan mampu melayani UK yang usahanya kurang bankable; dan (3) untuk dapat menghimpun tabungan sebagai modal dan menjalankan proses intermediasi dengan baik.

Kontribusi LPD dalam penanggulangan kemiskinan juga tergantung dari kinerja internal LPD yang bersangkutan. Kinerja keuangan internal LPD dapat dideteksi melalui analisis terhadap rasio-rasio keuangan yang ada. Secara konseptual menurut Perda No. 8 tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Perda No. 3 tahun 2007, pembagian sisa hasil usaha (keuntungan) LPD lebih banyak dinikmati oleh krama desa adat yang bersangkutan. Apabila kinerjanya menurun maka secara otomatis alokasinya terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi menurun. Dengan demikian ada dua jalur dalam penanggulangan kemiskinan di pedesaan di Provinsi Bali. Jalur pertama LPD membiayai usaha kecil, jalur berikutnya adalah usaha kecil membuka lapangan kerja sekaligus menaggulangi kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan melalui LPD juga dapat dilakukan melalui mekanisme kluster kabupaten/kota.

Dengan demikian hipotesis yang dapat dikembangkan dari landasan teori dan hasil penelitian terdahulu seperti yang dipaparkan di atas adalah:

- H1: Rasio aksesibilitas, rasio kredit, persentase nasabah, *return on asset* (ROA), rentabilitas dan rasio tabungan LPD berpengaruh secara simultan pada penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali.
- H2: Rasio aksesibilitas berpengaruh secara signifikan pada penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali.
- H3: Rasio kredit berpengaruh secara signifikan pada penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali.

H4: Persentase nasabah berpengaruh secara signifikan pada penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali.

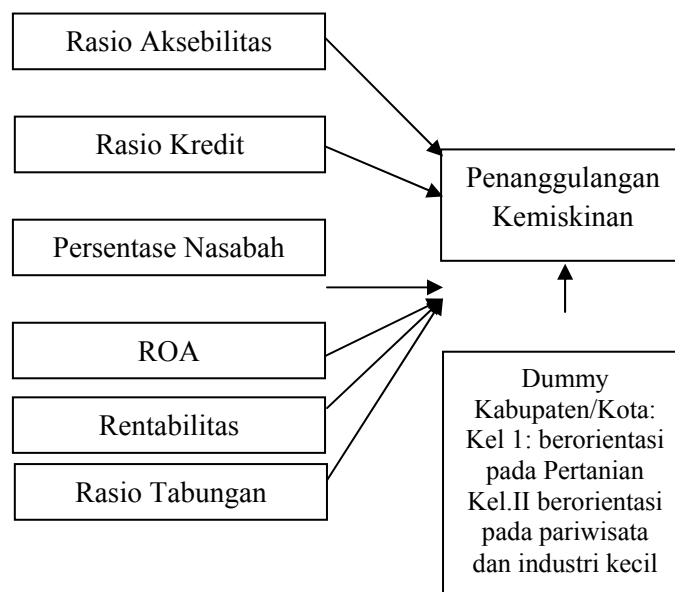
H5: ROA berpengaruh secara signifikan pada penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali.

H6: Faktor rentabilitas berpengaruh secara signifikan pada penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali.

H7: Rasio tabungan berpengaruh secara signifikan pada penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali.

H8: Faktor kelompok kabupaten (pertanian dan industri kecil/pariwisata) berpengaruh secara signifikan pada penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali.

Gambar 1 Kerangka Konsep Yang Dikembangkan



METODA PENELITIAN

Obyek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah LPD di 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data laporan keuangan dikonsolidasikan untuk masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 2 menyajikan data perkembangan jumlah dan keadaan keuangan LPD di Provinsi Bali dari tahun 1995-2008. Karena ketersediaan data, maka periode pengamatan dimulai dari tahun 2002 sampai dengan 2007 (6 tahun).

Tabel 2 Perkembangan LPD di Provinsi Bali

Kebupaten/Kota	Jumlah LPD	Jumlah Desa Pakraman/Desa Adat	Jumlah Aset (dalam ribuan rupiah)
1. Jembrana	35	35	392.836.909
2. Tabanan	299	341	331.363.325
3. Badung	119	119	1.513.089.765
4. Gianyar	267	276	696.940.127
5. Klungkung	99	106	130.830.326
6. Bangli	156	158	180.268.515
7. Karangasem	163	169	135.271.138
8. Buleleng	166	166	283.347.542
9. Denpasar	35	35	392.836.909

Definisi Operasional Variabel

- 1) Penduduk miskin Bali adalah penduduk miskin Bali yang diukur dengan prosentase
- 2) Rasio Akses adalah jumlah LPD dibagi dengan penduduk Bali yang menjadi anggota Desa Adat
- 3) Rasio Kredit adalah jumlah nominal kredit yang dikururkan dibagi penduduk Bali yang menjadi anggota Desa Adat
- 4) Rasio Nasabah adalah jumlah nasabah kredit dibagi penduduk Bali yang menjadi anggota Desa Adat
- 5) Return on Asset (ROA) adalah jumlah laba bersih yang diperoleh LPD dibagi aktiva yang dimiliki

- 6) Rasio rentabilitas adalah jumlah laba bersih yang diperoleh LPD dibagi modal yang digunakan (modal sendiri).

Analisis Data

Variabel bebas (*Independent Variable*) dalam penelitian ini adalah Rasio Aksesibilitas (R_Akses), Rasio Persentase Nasabah (P_Nsb), *Return on Asset* (ROA), Persentase Rentabilitas (R_Rent), Rasio Tabungan (R_Tab), dan dummy kabupaten (D1 s/d D3) sedangkan Variabel Terikat (*Dependent Variable*) dalam penelitian ini adalah Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali atau *Percentage of Population Below the Poverty* (%PBPL) di Provinsi Bali.

Model awal yang dikembangkan:

$$\%PBPL = a_0 + (a_1R_Akses + a_2R_Kredit + a_3P_Nsb) + (a_4ROA + a_5P_Rent + a_6R_Tab) + (Dummy) + \epsilon$$

Teknik Analisis data

Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan diawali dengan pengujian ekonometri model awal. Analisis juga dilengkapi dengan studi kasus pada satu LPD dalam

penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan balance scorecard. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan dielaborasi sehingga memiliki kedalaman dalam analisis dan menjadi pendukung dalam pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Statistik

Tabel 3 Deskripsi Statistik Untuk Keseluruhan Kabupaten/Kota

Variabel	Nilai Statistik				
	Nilai Minimum.	Nilai Rata-Rata	Nilai Maksimum.	Standar Deviasi	Jumlah Sampel
PMB (%)	2,1	7,144	10,49	2,148	54
Rasio Akses (Unit/1.000P)	0,000085	0,0005	0,00104	0,00026	54
Rasio Kredit (Juta Rp/1.000P)	67065,9	396228,327	2371419	428053,23	54
Rasio Nasabah (%)	0,045	0,114,679	0,2365991	54,505	54
ROA (return on asset (%))	0,0393	0,067	0,0673	0,0142	54
Rasio Rentabilitas (%)	0,22327	0,279	0,2793	0,03722	54
Rasio Tabungan (Juta Rp/1.000P)	55914,24	424679,5	2823009	492151	54

Sumber: data diolah

Keterangan:

1. PMB adalah penduduk miskin Bali yang diukur dengan prosentase
2. Rasio Akses adalah jumlah LPD dibagi dengan penduduk Bali yang menjadi anggota Desa Adat
3. Rasio Kredit adalah jumlah nominal kredit yang dikururkan dibagi penduduk Bali yang menjadi anggota Desa Adat

4. Rasio Nasabah adalah jumlah nasabah kredit dibagi penduduk Bali yang menjadi anggota Desa Adat
5. Return on Asset (ROA) adalah jumlah laba bersih yang diperoleh LPD dibagi aktiva yang dimiliki
6. Rasio rentabilitas adalah jumlah laba bersih yang diperoleh LPD dibagi modal yang digunakan (modal sendiri).

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini mengambil sampel seluruh LPD yang ada di Bali pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. Dari hasil deskripsi pada tabel 4.1 maka didapatkan rata-rata penduduk miskin Bali (PBM) dari keseluruhan sampel adalah 7,144%. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode 2002 sampai 2007 persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan adalah 7,144% dari penduduk Bali yang ada, dengan nilai maksimum 10,49 persen dan nilai minimum 2,1 persen. Angka kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Buleleng dan terendah di Kota Denpasar. Angka rata-rata Bali masih di bawah rata-rata nasional. Rasio akses sebesar 0,0005 artinya setiap 5 LPD melayani 10.000 orang atau dengan kata lain satu LPD melayani 2500 orang.

Di sisi lain, pada nilai maksimum menunjukkan rasio akses sebesar 0,0104 dan nilai minimum sebesar 0,000085. Rasio yang baik terjadi di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Rasio kredit adalah sebesar 396228 artinya setiap orang selama kurun waktu 6 tahun (dari tahun 2002 sampai 2007) mendapatkan rata-rata sekitar Rp 396.228 (atau sekitar Rp 400.000) dengan nilai minimum 67065 dan nilai maksimum 2371419. Rasio nasabah 0,114679 artinya setiap 1000 penduduk rata-rata yang menjadi nasabah LPD adalah 114 orang dengan nilai minimum sebesar 0,045 dan nilai maksimum sebesar 0,2365991. Nilai Return on Asset LPD di Bali selama kurun waktu 2002-2007 rata-rata adalah 0,067 artinya laba bersih dibagi aset rata-rata 6,7 % dengan nilai minimum

sebesar 0,0393 dan nilai maksimum sebesar 2823009. Nilai rentabilitas selama kurun waktu 6 tahun rata-ratanya adalah 0,279 dengan nilai minimum 0,22327 dan maksimum 0,2793. Rasio tabungan memiliki rata-rata 424679,5 dengan nilai

minimum sebesar 55914,24 dan maksimum sebesar 2823009.

Tabel 4 menerangkan bahwa dari 9 kabupaten/kota dapat dibagi dalam 2 kluster yaitu daerah yang berorientasi pada pertanian dan daerah yang berorientasi pada industri kecil/pariwisata.

**Tabel 4 Penjelasan Dalam Penerapan Variabel Dummy
Kriteria Kabupaten/Kota**

Pembagian Kabupaten/Kota	Kode
Kelompok I: Daerah yang berorientasi pada Pertanian: Kabupaten Jembrana, Buleleng, Tabanan, Bangli, Klungkung dan Karang Asem Gianyar	0
Kelompok II: Daerah yang berorientasi pada Industri Kecil dan Pariwisata seperti Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar	1

Pengujian Hipotesis

Pengujian Model Awal

Model awal yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah

$$\%PBPL = a_0 + a_1R_Akses + a_2R_Kredit + a_3P_Nsb + a_4ROA + a_5P_Rent + a_6R_Tab) + (Dummy) + \epsilon$$

Hasil uji asumsi klasik untuk model awal hanya terjadi masalah pada uji multikolinieritas yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji multikolinieritas: hasil ditunjukkan pada tabel 5 yang mengindikasikan

terjadinya korelasi yang sangat kuat antara rasio kredit dengan rasio tabungan. Korelasi ini bermakna bahwa orang yang meminjam kredit ke LPD juga sekaligus menjadi nasabah tabungan.

Tabel 5 Korelasi Antar Variabel

	PMB	R_Akses	R_Nsb.	R_Kredit	ROA	Rent	R_Tab	Dummy
PMB	1	0,359	-0,094	-0,471	-0,082	-0,247	-0,470	-0,806
R_Akses	0,359	1	0,688	-0,015	-0,137	-0,367	-0,029	-0,311
R_Nsb.	-0,094	0,688	1	0,565	-2,53	-0,143	0,551	0,305
R_Kredit	-0,471	-0,015	0,565	1	-0,339	-0,056	0,996	0,602
ROA	-0,082	0,137	-0,253	-0,339	1	-0,344	-0,369	-0,102
Rent.	-0,247	-0,367	-0,143	-0,056	0,344	1	-0,055	0,362
R_Tab.	-0,470	-0,029	0,551	0,966	-0,369	-0,055	1	0,608
Dummy	-0,806	-0,311	0,305	0,602	-0,102	0,362	0,608	1

Model awal ini kemudian "diobati" dengan menghilangkan R_kredit pada model 2 (a) dan

menghilangkan R_tab. (rasio tabungan) pada model 2 (b).

Pengujian Model 2(a)

Tabel 6 Hasil Regresi Berganda Model 2 (a)

Variabel	Koefisien	t statistik (Sig)	VIF	Kesimpulan
Konstanta	7,562	4,422 (0,000)		
R_Akses	-	-0,980 (0,332)	6,025	Tidak signifikan
P_Nsb	1476,842 15,314	1,903 (0,063)	7,199	Signifikan (marginal)
ROA	-31,368	-2,584 (0,013)	1,322	Signifikan
R_Tab	0,00	-1,4202 (0,167)	1,579	Tidak signifikan
Rent	8,871	1,558 (0,126)	3,237	Tidak signifikan
Dummy D3	-4,249	-7,372 (0,000)	2,816	Signifikan
R-Square	0,728			
Durbin-Watson (DW)	2,562			

Pengujian Model 2(b)

Tabel 7 Hasil Regresi Berganda Model 2(b)

Variabel	Koefisien	T-Start (Sig)	VIF	Kesimpulan
Konstanta	7,578	4,469 (0,000)		Signifikan
R_Akses	-1555,948	-1,031 (0,308)	6,071	Tidak signifikan
R_Kredit	0,000	-1,487 (0,144)	3,209	Tidak signifikan
R_Nsb	15,972	1,964 (0,055)	7,393	Signifikan marginal)
R_Rent	8,649	1,518 (0,136)	1,589	Tidak signifikan
R_ROA	-30,479	-2,550 (0,014)	1,288	Signifikan
dmy	-4,254	-7,419 (0,000)	2,801	Signifikan
R- Square	0,729			
Durbin-Watson (DW)	2,549			

Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis 1 yang berbunyi rasio aksesibilitas, rasio kredit, persentase nasabah, *return on asset* (ROA), rentabilitas dan rasio tabungan LPD berpengaruh secara simultan terhadap penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan uji F. Hasil pada model 2a dan 2b menunjukkan hasil yang signifikan. Ini berarti bahwa model ini sangat baik dalam memprediksi penanggulangan kemiskinan. Ini juga diperkuat oleh *r squared* yang tinggi dari kedua model tersebut yaitu:

0,728 untuk model 2a dan 0,729 untuk model 2b.

Dari 7 hipotesis alternatif yang diuji hanya H5 dan H8 saja yang diterima (model 2a dan 2b),

artinya ada pengaruh ROA dan pembagian kelompok kabupaten/kota terhadap penanggulangan kemiskinan. Penjelasan adalah sebagai berikut:

Rasio Akses

Pada kedua model di atas, R_aksess secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan. Ini artinya jumlah LPD yang ada belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dari statistik deskriptif aksesibilitas masyarakat Bali terhadap LPD masih rendah, meskipun kebanyakan desa adat sudah memiliki LPD. Rasio akses sebesar 0,0005 artinya setiap 5 LPD melayani 10.000 orang atau dengan kata lain satu LPD melayani 2500 orang. Di sisi lain, pada nilai maksimum menunjukkan rasio akses

sebesar 0,0104 dan nilai minimum sebesar 0,000085. Rasio yang baik terjadi di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Akan tetapi rasio Bali secara keseluruhan belum begitu baik. Ini logis, karena Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dilibatkan dalam penelitian ini hanya LPD dan tidak memasukkan LKM lainnya seperti Koperasi ataupun lembaga keuangan Bank seperti BPR atau bank-bank umum yang sekarang melakukan penetrasi ke desa dengan kredit pedesaan atau produk-produk lainnya.

Rasio Kredit

Rasio kredit dimasukkan pada model 2b tetapi dieliminasi pada model 2a. Pada model 2b rasio kredit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Sama seperti rasio akses, jumlah kredit yang disalurkan belum secara optimal dimanfaatkan oleh masyarakat atau kemungkinan kredit yang disalurkan belum menyentuh masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan.

Rasio Nasabah

Persentase nasabah (nasabah kredit) juga tidak berpengaruh secara signifikan (berpengaruh tetapi marginal) terhadap penanggulangan kemiskinan. Rasio nasabah sesungguhnya sama dengan rasio kredit sehingga esesnsinya adalah masyarakat belum memanfaatkan LPD secara optimal.

Rasio Return on Asset (ROA)

Pada kedua model (2a dan 2b) di atas ROA berpengaruh negatif terhadap presentase angka kemiskinan secara signifikan, artinya peningkatan persentase ROA dapat mengakibatkan penurunan angka kemiskinan. Di lapangan menunjukkan bahwa dalam setiap tahun keuntungan LPD (20% dari keuntungan bersih LPD) dibagikan kepada desa adat selaku pemilik. Misalnya katakanlah LPD Desa Adat X tahun 2007 meraup keuntungan Rp 1 milyar, maka Rp 200 juta akan dikontribusikan kepada desa adat yang bersangkutan. Contoh faktual yang terjadi di LPD desa adat Pecatu, sesuai dengan Perda maka alokasi laba atau keuntungan bersih adalah sebagai berikut:

1. Cadangan Umum : 40%= Rp. 1.622.764.862
2. Cadangan Tujuan: 20%= Rp. 811.382.431
3. Dana Pembangunan Desa: 20%= Rp. 811.382.431

4. Jasa Produksi: 10%= Rp. 405.691.215
5. Dana Sosial : 5% = Rp. 202.845.608
6. Dana Pembinaan LPD: 5%=Rp. 202.845.608

Jumlah Laba *Rp. 4.056.912.154*

Akumulasi dana yang masuk ke desa adat akan menyebabkan masyarakat tidak akan terbebani untuk membayar iuran. Seperti diketahui masyarakat desa adat dalam setiap tahunnya akan membayar iuran kepada desa adat. Di lain pihak biaya-biaya untuk keperluan upacara juga cukup tinggi. Di samping itu keuntungan yang diperoleh juga digunakan untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat dan menjadi sumber dana pembangunan desa adat. Terbebasnya masyarakat dari iuran yang berlebihan dengan sendirinya akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Rasio Tabungan

Rasio tabungan juga tidak berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan. Ini mempunyai makna kemungkinan besar tabungan masyarakat di LPD digunakan sebagai cadangan konsumsi.

Rentabilitas

Rasio rentabilitas tidak berpengaruh disebabkan: 1) laba usaha yang ditahan tinggi yang mengakibatkan berkurangnya dana yang dipinjamkan. 2) menurunnya modal sendiri LPD.

Variabel Dummy

Variabel dummy memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Artinya pembagian kabupaten/kota berdasarkan dua katagori yaitu daerah yang berbasis pertanian dan pariwisata/ industri kecil mempunyai peranan dalam penanggulangan kemiskinan. Perubahan terhadap kinerja LPD pada daerah pariwisata/industri kecil seperti Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan.

Balance Scorecard (BSC) dan Penanggulangan Kemiskinan: Studi Eksperimen Lapangan LPD Desa Adat Pecatu

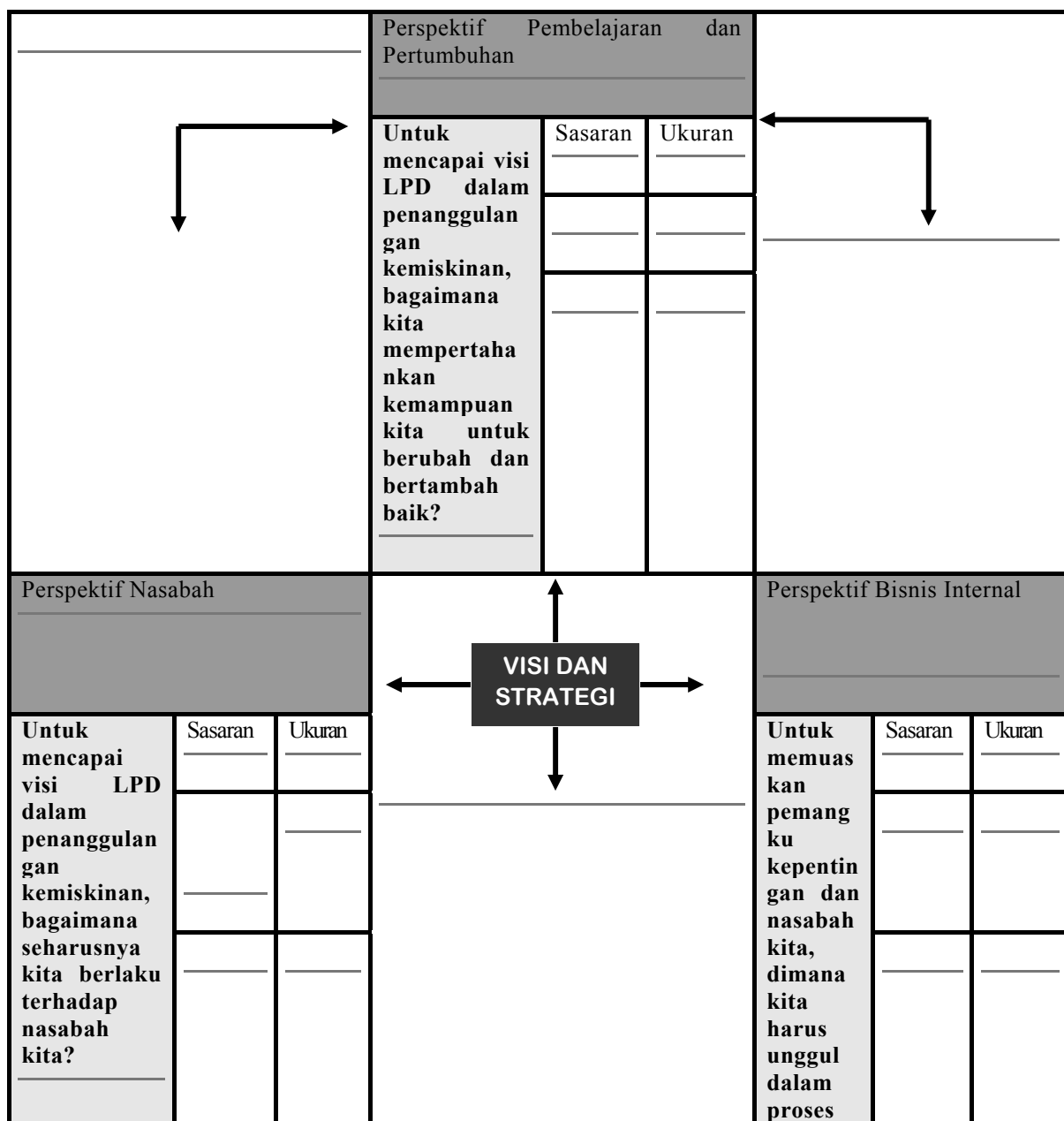
Untuk memperkuat pengujian hipotesis dengan analisis kuantitatif di atas, maka dilakukan

studi kasus mengenai penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan kasus LPD Desa Adat Pecatu. Seperti yang disebutkan dalam pengujian hipotesis bahwa kinerja internal LPD (ROA) mempengaruhi penanggulangan kemiskinan. Eksperimen lapangan dilakukan dengan menerapkan metoda BSC untuk kepentingan pengukuran kinerja internal dan implementasi strategi. Untuk menuju lembaga keuangan mikro yang modern dan memiliki kinerja internal yang tinggi khususnya dalam penanggulangan kemiskinan, LPD Desa Adat Pecatu telah menyerap pemikiran dan konsep

mengenai *balance scorecard* yang intinya tidak hanya berbicara soal pengukuran kinerja tetapi juga pengembangan organisasi. Penerapan BSC dilakukan pada awal Juli tahun 2009 dan dilihat hasilnya pada akhir Juni tahun 2010. Penerapan BSC dilakukan dengan beberapa cara diantaranya memberikan pelatihan kepada karyawan dan melakukan survei nasabah.

Gambar 2 memperlihatkan rerangka umum *Balance Scorecard* pada LPD Desa Adat Pecatu dalam rangka menaggulangi kemiskinan melalui kinerja internal yang semakin baik .

Gambar 2 Rerangka Umum BSC LPD Desa Adat Pecatu dalam Penanggulangan Kemiskinan



				usaha kita?		
			Perspektif Keuangan			
			Untuk berhasil dalam hal kinerja keuangan, bagaimana seharusnya kinerja kita di hadapan pemilik LPD?	Sasaran	Ukuran	

Sumber: Suartana (2009)

Lebih lanjut pada Tabel 8 disajikan empat kinerja kunci yang bisa diterapkan pada LPD sebagai upaya untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko ke dalam aktivitas harian LPD Desa Adat Pecatu. Empat kinerja kunci ini dapat dipakai oleh

pengelola LPD untuk menjalankan strategi perusahaan menghadapi persaingan, antisipasi tuntutan pemangku kepentingan, permintaan nasabah yang semakin dinamis dan perubahan lingkungan eksternal.

Tabel 8 Empat Kinerja Kunci LPD Desa Adat Pecatu dalam Penanggulangan Kemiskinan

No	Faktor Strategis Internal Kunci	Skor	Penjelasan	Alasan
1	Kinerja Perspektif Keuangan - ROA - BOPO - CAR - NPL - ROE - LDR -Rasio Profitabilitas terhadap Kemiskinan			
2	Kinerja Perspektif Nasabah -Jenis-jenis produk dan Variannya - Level suku bunga - Biaya administrasi dan Provisi - Kegiatan promosi			
3	Kinerja Perspektif Proses Bisnis Internal - Proses pembukaan rekening - Lamanya pelayanan terhadap kreditur - Proses permohonan kredit - Lamanya pencairan kredit - Pemantauan internal			

-
- 4 Kinerja Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
- Tingkat Pendidikan
 - Pengembangan karir
 - Sistem remunerasi/penggajian
 - Struktur karyawan
 - Fleksibilitas organisasi
 - Tingkat ketersediaan informasi
 - Tingkat kepuasan kerja
 - Tingkat produktivitas karyawan
- LPD
-

Sumber: Suartana (2009)

Kinerja Perspektif Keuangan

Perspektif ini mengukur kinerja dari sudut pandang penyedia sumber daya dan ketercapaian target keuangan sebagaimana yang ditetapkan pada anggaran LPD Desa Adat Pecatu. Untuk mengetahui kinerja keuangan, alat analisis rasio keuangan seperti ROA (Return on Asset), BOPO (Biaya Operasional dibandingkan Pendapatan Operasional), CAR (Capital Adequacy Ratio) dan lain-lain dapat digunakan oleh LPD. Hal terbaru yang bisa diterapkan di LPD adalah bagaimana profitabilitas atau keuntungan LPD dibandingkan dengan tingkat kemiskinan daerah yang menjadi lingkup LPD. Kemiskinan adalah variabel yang bisa diukur, sehingga dengan kehadiran LPD diharapkan angka kemiskinan pada daerah tersebut menjadi menurun. Peranan LPD Desa Adat Pecatu dalam penanggulangan kemiskinan adalah melalui suatu moderasi dengan usaha kecil sebagai kekuatan pemoderasinya. LPD Desa Adat Pecatu mempunyai prioritas untuk usaha kecil dalam penyaluran kreditnya.

Kinerja Perspektif Nasabah

Perspektif ini merupakan indikator tentang bagaimana nasabah melihat LPD Desa Adat Pecatu dan bagaimana LPD memandang mereka. Indikator utama yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana nasabah memandang LPD adalah tingkat kepuasan nasabah yang bisa diketahui melalui survei pelanggan, adanya pengaduan dan sikap dan perilaku mereka yang dapat diketahui dari keluhan-keluhan yang mereka sampaikan. Aspek lain meliputi juga jenis-jenis pelayanan yang diberikan pada nasabah. LPD terus berinovasi untuk memuaskan kebutuhan nasabah. Sebagai sebuah kebijakan strategis, pelayanan pada nasabah yang dil-

akukan oleh LPD Desa Adat Pecatu dinyatakan melalui penciptaan rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi. Rasa aman dan nyaman dapat menumbuhkan sekaligus meningkatkan loyalitas nasabah. Begitu nasabah menikmati rasa aman dan nyaman, ia tidak akan mau berpindah ke tempat lain. Rasa aman dan nyaman juga dapat menjadi pemicu timbulnya *switching cost* (biaya berpindah) bagi nasabah. Artinya, dengan adanya layanan itu, nasabah akan enggan berpindah ke tempat lain karena ada biaya yang harus ditanggung. Pada kondisi ini, sering kali bunga tidak lagi menjadi pertimbangan utama.

Kinerja Perspektif Proses Bisnis Internal

Perspektif ini mencakup indikator produktivitas, kualitas, waktu layanan, waktu tunggu dan sebagainya. Pengelola LPD Desa Adat Pecatu mengidentifikasi berbagai proses penting yang harus dikuasai dengan baik sejak menjadi calon nasabah sampai menjadi nasabah. Tiga aktivitas yang dapat mendukung yaitu proses inovasi, proses operasi, dan proses pemeliharaan nasabah. Perspektif ini memungkinkan untuk mengevaluasi apakah proses telah mengalami peningkatan dan sejajar dengan patok duga atau mencapai standar yang ditetapkan. Proses pembukaan rekening telah dihitung memakan waktu seberapa lamanya. Pemantauan internal juga dilakukan dalam rangka mengevaluasi standar operasional dan prosedur apakah sudah mencerminkan keseimbangan antara kecepatan dan pengendalian terhadap risiko. Contoh kecil misalnya, ada surat yang ditujukan ke LPD dan harus ada balasan, maka LPD Desa Adat

Pecatu telah mempunyai standar waktu untuk membalas surat tersebut.

Kinerja Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Perspektif ini mencakup manfaat dari pengembangan baru dan bagaimana hal ini dapat memberikan kontribusi bagi kesuksesan di masa depan. Mengukur hasil dari tindakan dan aktivitas dalam perspektif ini mungkin tidak dapat dilakukan karena hasilnya tidak segera dapat diketahui dan bersifat jangka panjang. Pengembangan karir pegawai LPD Desa Adat Pecatu juga telah mendapat perhatian yang serius sehingga setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menapak karier yang lebih tinggi. LPD Desa Adat Pecatu juga menggunakan sistem *reward* and *funishment* yang jelas dan transparan.

Setelah dilakukan eksperimen lapangan selama 1 tahun (1 Juli 2009-30 Juni 2010) dengan menerapkan BSC pada LPD Desa Adat Pecatu didapatkan beberapa indikator hasil sebagai berikut:

1. Aset meningkat secara signifikan dari sebelum diterapkan BSC. Pada periode sebelum diaplikasikan BSC aset LPD Desa Adat Pecatu yaitu per 30 Juni 2009 adalah sebesar Rp 107.406.963.631 meningkat menjadi Rp 132.933.969.647 per 30 Juni 2010. Peningkatan ini sebesar 35% dan signifikan.
2. Keuntungan bersih untuk semester pertama tahun 2009 adalah Rp 2.251.479.719 meningkat menjadi Rp 3.049.451.903 semester pertama tahun 2010. Peningkatan ini sebesar 38%. Peningkatan keuntungan ini akan dimanfaatkan oleh LPD Desa Adat Pecatu untuk merealisasikan program/kegiatan dalam menanggulangi kemiskinan:
 1. Program Kredit Berbasis Komunitas: program ini melibatkan tiga banjar adat yang ada di wilayah Desa Adat Pecatu
 2. Program Kredit tanpa Agunan: program kredit ini mempunyai nilai maksimal Rp 10 juta tanpa dimintai jaminan.

3. Bea Siswa bagi siswa yang tidak mampu: diberikan kepada siswa SD dan SMP kurang mampu atau kepada siswa yang mempunyai kemampuan akademik yang tinggi.
4. Program Iuran Dana Ngaben: program ini menjadi unggulan LPD Desa Adat Pecatu dalam pengentasan kemiskinan. Cara kerjanya setiap penabung dengan saldo terendah Rp 200.000 dipotong untuk dijadikan iuran dana ngaben. Program iuran dana ngaben identik dengan asuransi jiwa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan pada bagian di atas dapat ditarik simpulan:

Analisis kinerja keuangan internal lewat analisis informasi keuangan terbukti bisa memprediksi penurunan angka kemiskinan. LPD di Provinsi Bali belum optimal dalam akses, tabungan, dan penyaluran kreditnya terbukti hasilnya belum signifikan dalam menanggulangi kemiskinan. Kontribusi yang diberikan adalah lewat *return on asset* (ROA) yang dihasilkan yang berarti keuntungan bersih dibandingkan dengan aset yang dikelola memberikan pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan. Ini merupakan konsekuensi logis dari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 8 tahun 2002 sebagaimana telah direvisi menjadi Perda No. 3 tahun 2007 yang mengatur pembagian keuntungan bersih LPD yang sebesar-besarnya diberikan kepada desa adat termasuk *krama* (masyarakat adatnya). Keuntungan bersih yang diberikan adalah sebesar 20 % dari seluruh keuntungan yang dihasilkan pertahunnya. Keuntungan bersih inilah yang merupakan elemen dari kinerja internal dan dengan pendekatan balance scorecard keuntungan bersih meningkat dari tahun sebelumnya.

Penelitian ini menggabungkan LPD yang sudah maju dan sehat (ada di kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar) dan kurang maju dan kurang sehat (ada di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Buleleng, Klungkung, Bangli dan Karangasem) sehingga kemungkinan besar bisa mempengaruhi hasil. Terbukti apabila menggunakan dummy hasilnya signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2001. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Revisi 2001. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 2006. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Ikhsan, M. 1999. The Disaggregation of Indonesian Poverty: Policy and Analysis. Ph.D. Dissertation. University of Illinois, Urbana.
- Mubyarto. 1997. Program IDT dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa Tenggara. Yogyakarta: Aditya Media
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Pinasti, M. 2007. "Pengaruh Penyelenggaraan dan Penggunaan Informasi Akuntansi terhadap Persepsi Pengusaha Kecil atas Informasi Akuntansi: Suatu Riset Eksperimen. Makalah SNA 10, Makassar
- Kaplan, Robert and David P. Norton. 1996. The Balance Scorecard. Harvard Business School Press.
- Seibel, Hans Dieter. 2008. Desa Pakraman and Lembaga Perkreditan Desa in Bali: A study of the relationship between customary governance, customary village development, economic development and LPD development. ProFI Working Paper 03/2008. Bank Indonesia & GTZ/ProFI.
- Seibel, Hans Dieter and Nurcahya 2010. www.inwert.org. Diakses 1 Mei 2010
- Suartana, I Wayan. 2009. *Arsitektur Pengelolaan Risiko pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*. Udayana University Press
- Sumodiningrat, Gunawan. 2003. Peran Lembaga Keuangan dalam Menanggulangi Kemiskinan terkait dengan Kebijakan Otonomi Daerah. www.ekonomirakyat.org
- Sutopo, Wahyudi. 2005. Hubungan antara Lembaga Keuangan Mikro dan Kontribusi Usaha Kecil dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Usahawan* No. 01 Th. XXXIV, Januari
- Uma Sekaran, 2006, *Research Methods For Businnes (Metodologi Penelitian untuk Bisnis)*, Jakarta, Salemba Empat.